



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KEBUTUHAN ANGGARAN KEMENTERIAN HAM 20 TRILIUN

Puteri Hikmawati

Analisis Legislatif Ahli Utama
puteri.hikmawati@dpr.go.id

Yunidar

Analisis Kebijakan Ahli Muda
yunidar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI pada 31 Oktober 2024, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigi, menyebutkan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp20 triliun untuk anggaran program prioritas, belanja pegawai, sarana prasarana, dan lain-lain, dari yang semula Rp64 miliar. Salah satu alasan yang disebutkan Menteri HAM karena adanya penambahan pegawai di Kementerian HAM. Pegawai Kementerian HAM saat ini berjumlah 188 orang. Dengan perubahan struktur Kementerian HAM dibutuhkan 2.544 pegawai dengan pembagian di pusat sebanyak 762 pegawai dan di 33 kantor wilayah berjumlah 1.782 pegawai. Untuk gaji, tunjangan, dan tunjangan kinerja pegawai dibutuhkan lebih dari satu triliun dua miliar lima ratus sembilan belas juta sepuluh ribu Rupiah.

Sementara itu, program tahun 2025 yang diusulkan Kementerian HAM adalah, *pertama*, pendampingan program prioritas pemerintah dan *quick wins* yang berdimensi HAM; *kedua*, pembangunan kesadaran HAM; *ketiga*, pembangunan *icon* HAM dunia; *keempat*, dukungan bagi organisasi masyarakat sipil; *kelima*, pelaksanaan audit HAM; *keenam*, pembangunan citra positif HAM dunia internasional; *ketujuh*, kurikulum berbasis HAM; *kedelapan*, pelatihan dan sosialisasi HAM; serta *kesembilan*, pemantauan dan pemulihan korban HAM.

Salah satu program yang diusulkan, Kementerian HAM akan membangun kesadaran HAM bagi komunitas. Dalam membangun budaya HAM di Indonesia dengan lokasi di 83.971 komunitas, alokasi anggaran pada setiap lokasi seratus juta Rupiah, dengan total sebesar Rp8,3 triliun. Selain itu, Kementerian HAM juga akan membangun Universitas HAM dan Rumah Sakit HAM yang bertaraf internasional, serta revitalisasi dan pembangunan Pusat Studi HAM. Satu program yang dibuat perlu menyentuh 280 juta jiwa. Menteri HAM juga menyampaikan keinginan membentuk 83 ribu kelompok yang siap terjun ke lapangan. Tim di lapangan sudah dibentuk 1.007 tim yang siap bekerja.

Menanggapi rencana Kementerian HAM tersebut, salah satu Anggota Komisi XIII DPR-RI, Yasonna H. Laoly, mengatakan Kementerian HAM seharusnya melihat realita kondisi keuangan negara terkini. Saat pembahasan lalu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp600 triliun. Sementara tahun 2025 masih ada utang negara yang jatuh tempo sekitar Rp800 triliun. Kondisi ekonomi nasional dan global pun tidak memungkinkan penggunaan anggaran negara dengan nilai fantastis. Hal ini akan menjadi defisit APBN. Opsi lain, soal wacana membuat universitas HAM, dapat dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai HAM dalam kurikulum.

Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengatakan permintaan tambahan anggaran dan sumber daya manusia di Kementerian HAM tidak mendesak diwujudkan. Basis kerjanya adalah edukasi, literasi, dan kampanye. Kementerian HAM ke depannya akan berperan dalam fungsi koordinasi antar-lembaga dan kementerian.

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah mengedepankan perspektif HAM, menjadikan HAM sebagai prinsip utama dalam tata kelola dan pelaksanaan pemerintahan sesuai visi dan misi presiden.

Bambang Widjojanto, Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)/Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2011–2015, menanggapi pernyataan Menteri HAM soal permintaan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo di bidang HAM, bahwa sebelum menyampaikan kepada publik, semestinya Menteri HAM terlebih dahulu membicarakan permintaan anggaran tersebut di internal Kementerian HAM agar tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kajian tentang anggaran yang tergolong besar itu penting dibahas secara komprehensif untuk memastikan program-program pemajuan HAM di tanah air berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat. Saat ini faktanya Indonesia sedang dihadapkan dengan defisit APBN. Dengan kondisi tersebut, negara tentu akan melihat skala prioritas kementerian.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo, menilai permintaan anggaran kementerian yang disebut tidak masuk akal, menuai polemik dan dikritik sejumlah pihak. Oleh karenanya dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari Kementerian HAM untuk membangun perspektif HAM di tengah masyarakat melalui beragam program yang murah dan mudah untuk peduli pembangunan HAM.

Atensi DPR

Komisi XIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan, perlu mengadakan Rapat Kerja (Raker) kembali dengan Kementerian HAM, dengan meminta Menteri HAM membuat prioritas program yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari program 100 hari. Selain itu, Komisi XIII DPR RI mendorong agar Kementerian HAM proporsional dan profesional dalam penyusunan program kerja dan penganggaran kebutuhan yang rasional. Kementerian HAM perlu mempertimbangkan kembali usulan program dengan kebutuhan anggaran Rp20 triliun, agar disesuaikan dengan realita anggaran negara. Berkaitan dengan reorganisasi, Kementerian HAM perlu berkoordinasi dengan Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, agar dalam masa transisi perubahan Kementerian tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel. Perubahan kementerian diharapkan tidak menjadi hambatan dalam melayani masyarakat.

Sumber

antaranews.com, 31 Oktober dan 1 November 2024;
bbc.com, 25 Oktober 2024;
cnnindonesia.com, 23 Oktober 2024;
detik.com, 31 Oktober 2024;
kompas.com, 31 Oktober 2024;

metro.tempo.co, 22 Oktober 2024;
rri.co.id, 23 Oktober 2024;
tempo.co, 2 November 2024;
Bahan Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan
Kementerian HAM, 31 Oktober 2024.



EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024